

ABSTRAK

Siahaan, Sion Peronica. 2023. Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Partai Politik Dan Pertanggungjawaban Pidananya. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dedy Syaputra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Korupsi, Partai Politik, pertanggungjawaban pidana.

Korupsi politik yang terjadi di Indonesia berkorelasi positif dengan kegiatan pencairan dana parpol untuk membiayai kegiatan politik partai, baik dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah sah dan dapat dilakukan, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana yang masuk ke kas partai politik melalui lembaga PPATK. Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanya lah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Siahaan, Zion Peronica. 2023. Corruption Crimes by Individual Political Parties and Their Criminal Liability. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Dedy Syaputra, S.H., M.H. As Supervisor I and Hisbah, S.H., M.H. As Supervisor II.

Key words: Corruption, Political Parties, criminal liability

Political corruption that occurs in Indonesia is positively correlated with the disbursement of political party funds to finance party political activities, both on a national scale. This research aims to determine the criminal responsibility of political parties for criminal acts of corruption. To find out the penalties that can be imposed on political parties that commit criminal acts of corruption. The research method used is normative juridical. The results of the research are the criminal responsibility of political parties for criminal acts of corruption, namely Article 20 Paragraphs (1) and (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The punishment that can be imposed on a political party that commits a criminal act of corruption which is proven to have committed a criminal act of corruption is legal and can be carried out, if the political party is considered a corporation and it can be proven that there is a flow of funds entering the political party's coffers through the PPATK institution. Dissolution of political parties as an additional form of punishment can be carried out. Regarding the authority of two judicial institutions to dissolve political parties, the two judicial institutions can do the same thing for different reasons or other options, namely the division of authority where the criminal justice system is only a recommendation considering that the penalty for freezing or dissolving a corporation is only an additional penalty, whereas freezing or Dissolution remains the authority of the Constitutional Court.